BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Perencanaan Pelaksanaan Program READ di Sulawesi Tengah

4.1.1 Komponen A *Community Empowerment* (Pemberdayaan Masyarakat)

Tujuan komponen ini ialah untuk memberdayakan masyarakat pedesaan yang miskin untuk dapat melakukan perencanaan dan mengelola prioritas pembangunan mereka sendiri secara inklusif dan transparan, sesuai dengan asset, peluang dan kekuatan yang ada pada masyarakat desa. Disamping itu, komponen ini juga akan membangun kapasitas masyarakat, khususnya kelompok miskin sehingga dapat menentukan kebutuhan prioritasnya. Untuk mecapai tujuan tersebut dibutuhkan beberapa strategi yaitu:

1. Pembangunan kapital sosial untuk mendukung proses pengembalian keputusan dan perencanaan di tingkat desa dan pengelolaan aset dan peluang ekonomi di tingkat masyarakat.
2. Perluasan partisipasi dan manfaat bagi kelompok masyarakat yang tersisihkan, seperti masyarakat miskin, dan kaum perempuan.
3. Pengaitan kelembagaan dan kegiatan ditingkat masyarakat dengan kelembagaan antara publik dan swasta di tingkat yang lebih tinggi dan relevan.

4.1.1.1 Sub-Komponen A.1 Pegadaan Fasilitator Desa

Seleksi fasilitator desa dilakukan dengan memperhatikan usulan masyarakat di desa yang bersangkutan. Fasilitator desa akan bertugas secara

penuh di desa yang bersangkutan selama empat tahun berturut-turut. Oleh karena itu perlu diupayakan agar fasilitator desa yang dipilih berasal dari warga desa atau kecamatan setempat dan memiliki pemahaman yang baik mengenai desa tempat tugasnya. Fasilitator desa akan direkrut oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah dipilih untuk dikontrak oleh *Distric Management Unit* (DMU). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut sekaligus akan memberikan pelatihan kepada para fasilitator desa sebelum dilaksanakan mobilisasi.

Di setiap desa ada seorang fasilitator desa (total ada 150 fasilitator desa), pemilihan fasilitator desa disesuaikan dengan jumlah desa sasaran yang melaksanakan program READ. Jumlah fasilitator desa antara laki-laki dan perempuan diusahakan seimbang sesuai dengan kebutuhan di desa lokasi program. Pengadaan fasilitator desa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jumlah desa yang menjadi lokasi program.

Fasilitator desa paling tidak merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan lebih diutamakan memiliki pengalaman 3 sampai 5 tahun, yang bekerja atau tinggal di wilayah pedesaan. Jumlah fasilitator desa akan diatur sedemikian rupa sehingga jumlah fasilitator desa yang berjenis kelamin laki-laki sama dengan yang perempuan. Pengalaman dalam aspek pembangunan pedesaan menjadi nilai tambah yang dapat diperhitungkan. Program akan menyediakan biaya operasional yang diperlukan selain penghasilan rutin bagi anggota fasilitator desa.

Fasilitator desa akan melaksanakan fasilitasi kepada masyarakat dalam komponen pemberdayaan masyarakat, melalui pengembangan kapasitas administrator desa, unit usaha organisasi dan anggota rumah tangga miskin di desa melalui proses perencanaan partisipatif, bernuansa budaya dan gender untuk mengidentifikasi dan merumuskan prioritas inisiatif pembangunan.

4.1.1.2 Sub-Komponen A.2 Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Tingkat Desa

4.1.1.2.1 Penguatan Perencanaan Desa

1. Pengenalan Program READ

Setelah seleksi desa sasaran selesai dilakukan, dilaksanakan pertemuan di setiap desa untuk memperkenalkan program READ pada masyarakat yang dilaksankan dalam dua tahap. Pertemuan pertama, tahap ini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan program READ. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menginformasikan program READ serta mekanisme pelaksanaan kegiatan di desa. Hasil yang diharapkan dari pertemuan ini adalah adanya komitmen dari desa yang bersangkutan pada prosedur perencanaan yang telah ditetapkan dan menerima pendekatan program, serta kesediaan mereka untuk menerima fasilitator desa selama masa program. Pertemuan ini dipimpin oleh staf senior program READ di kabupaten yang telah menguasai program dan konsep READ. Pertemuan dihadiri oleh seluruh wakil masyarakat desa yang bersangkutan, termasuk kaum perempuan, rumah tangga yang terisolasi atau kelompok etnis minoritas, dan keluarga miskin. Setelah pertemuan pertama ini, desa akan

musyawarah tentang keikutsertaan mereka dalam program. Pertemuan kedua dilaksanakan dua minggu kemudian, setelah mereka bersepakat untuk ikut serta dalam program. Dalam pertemuan ini diharapkan telah dibentuk unit pengelola kegiatan program READ untuk pelaksanaan pembangunan infrastuktur dan pengelolaan dana pengembagan usaha tani. Dari kedua pertemuan tersebut diharapkan seluruh desa mendapatkan informasi yang memadai mengenai program dan mereka menentukan sendiri keikutsertaannya.

2. Pelaksanaan Pengkajian Perdesaan Secara Partisipatif (*Village Survey Participatory Rural Appraisal*)

Kegiatan ini merupakan tahapan awal untuk meningkatkan keterampilan dalam perencanaan dan tata pemerintahan desa bagi aparat desa dalam mengkaji sumber daya alam, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dikaitkan dengan produktivitas kerja, kesejahteraan keluarga, akses dan kontrol pada sumber daya alam, pengambilan keputusan ditingkat desa dan keluarga serta kegiatan sosial di desa yang bersangkutan. Perencanaan dan pelaksanaan survey tersebut akan dilaksanakan oleh masyarakat desa dan fasilitator desa serta didukung oleh staf senior program dari tingkat provinsi dan kabupaten yang telah dilatih. Kegiatan ini kira-kira memerlukan waktu dua hari.

3. Lokakarya Tahunan Perencanaan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan melalui strategi berikut:

1. Klalifikasi peran, struktur dan fungsi lembaga desa (termasuk kepala desa, kepala adat dan lainnya) serta tanggung jawab mereka pada

seluruh masyarakat, termasuk kelompok perempuan rumah tangga miskin dan etnis minoritas.

2. Penyebaran informasi kepada publik, prinsip-prinsip *akuntabilitas* dan *transparansi* dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan.
3. Pengembangan kebijakan dan regulasi di tingkat desa yang sesuai seperti penggunaan sumber daya milik bersama.
4. Kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan.
5. Instrumen partisipatif untuk penilaian dan perumusan prioritas mata pencaharian desa dan sumber daya.
6. Proses perencanaan partisipatif dalam kegiatan, perumusan proposal, monitoring dan evaluasi.
7. Pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan jika diperlukan upaya-upaya pencegahan, atau pembangunan dan perencanaan infrastruktur yang memerlukan pertimbangan dampak lingkungan.
8. Peningkatan partisipasi kelompok perempuan, rumah tangga miskin dan kelompok etnis minoritas dalam pemerintah desa dari waktu ke waktu.

4. Studi Banding Untuk Aparat Desa

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan wawasan dan pengalaman kepada aparat desa yang berkaitan dengan perencanaan desa. Studi banding ini

dilaksanakan ke desa lain di kabupaten yang sama yang memiliki permasalahan yang sama tetapi berhasil melaksanakan perencanaan pembangunan desa. Kegiatan ini dilakukan pada pelaksanaan program ke satu selama satu sampai dua hari. Jumlah peserta studi banding untuk setiap desa sesuai dengan anggaran yang tersedia. Hasil yang diharapkan dari sub-komponen pengambilan keputusan dan perencanaan di tingkat desa adalah, meningkatnya kemampuan pemimpin desa dalam melaksanakan perencanaan dan pengambilan keputusan yang partisipatif.

4.1.1.2.2 Perlibatan Kelompok Miskin (*Including Interest Of the Poor*)

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut mencakup:

1. Bekerja terpisah dengan rumah tangga miskin, kelompok atau lembaga masyarakat miskin, dan kelompok perempuan di desa.
2. Menggali kepentingan dan kebutuhan mereka dan menjamin bahwa hal tersebut masuk dalam proses perencanaan tahunan.
3. Membangun kapasitas mereka secara bertahap sehingga mampu memberikan masukan yang berarti dalam proses perencanaan.
4. Bertindak sebagai mediator dalam penyediaan informasi untuk menjamin bahwa seluruh kelompok masyarakat di desa mengetahui tentang perencanaan pembangunan tahunan di desa.
5. Menganalisa kendala yang di hadapi dalam upaya memasukan kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam proses perencanaan desa dan dalam seleksi infrastruktur produktif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, program akan mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan pendekatan partisipatif untuk aparat desa dan pemimpin kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari untuk setiap desa baru, dihadiri oleh dua puluh lima orang per desa.
2. Pertemuan-pertemuan dengan kelompok masyarakat yang mewakili masyarakat miskin, kaum perempuan atau kelompok tersisihkan lainnya. Kegiatan ini di laksanakan dua hari, serta dihadiri oleh dua puluh lima orang per desa.
3. Pengembangan materi informasi dan diseminasi informasi diantara kelompok tersebut.
4. Penyediaan tenaga konsultan untuk penyusunan kurikulum dan pedoman pelatihan.

4.1.1.2.3 Peningkatan Pelayanan Aparat Pemerintah (*Public Sector Up-Reach*)

Kegiatan-kegiatan yang akan difasilitasi program mencakup:

1. Pelatihan petugas pemerintah agar lebih efektif dan partisipatif berinteraksi dalam pelaksanaan pemerintah desa. Kegiatan ini akan dilaksanakan dua kali setahun, serta dihadiri oleh aparat desa, selama satu sampai dua hari.
2. Studi banding (*Exposure Visit*) bagi staf pemerintah kabupaten (termasuk aparat desa) ke kabupaten lain dalam provinsi Sulawesi

tengah yang memiliki pengalaman keberhasilan melaksanakan prinsip desentralisasi. Kegiatan ini dilaksanakan satu tahun sekali di setiap kabupaten, selama satu sampai dua hari.

3. Pelatihan khusus untuk aparat desa yang akan dilaksanakan mulai tahun ke tiga pelaksanaan program.
4. Mengorganisasikan forum-forum di tingkat kecamatan yang merupakan *stakeholder* utama dari pihak pemerintah, Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM), kepala desa, serta program pembangunan lain yang relevan untuk menjamin terkoordinasinya dan terklarifikasinya model desentralisasi perencanaan. Kegiatan ini di biayai oleh pemerintah daerah, dan menjadi kegiatan rutin.
5. Penyediaan tenaga ahli dibidang pelatihan yang akan memfasilitasi pelatihan, serta menyusun kirikulum dan pedoman pelatihan yang diperlukan untuk aparat pemerintah daerah, termasuk aparat desa. Penyediaan tenaga ahli akan dibiayai oleh dana pinjaman, termasuk biaya perbaikan materi pelatihan.
6. Diseminasi informasi di tingkat kabipaten, provinsi dan nasional tentang pengalaman keberhasilan dan dialog kebijakan di setiap tingkat pemerintahan. Kegiatan ini dibiayai oleh pemerintah daerah.
7. Diseminasi informasi ke desa-desa mengenai proses dan rencana pemerintah dan penyedia jasa/pelayanan lainnya. Kegiatan ini dibiayai oleh pemerintah daerah.

4.1.1.3 Sub-Komponen A.3 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Pedesaan (*Economic Management*)

Tujuan utama sub-komponen ini untuk mengembangkan sumber daya di tingkat masyarakat untuk mendukung pengelolaan aset produktif dan peluang ekonomi, bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat dan individu. Sub-komponen pembagunan sumber daya sosial ini terdiri dari tiga kegiatan utama yang meliputi:

4.1.1.3.1 Penguatan Kapasitas Dalam Pengelolaan Sumber Daya Sosial Dan Sumber Daya Ekonomi

Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan landasan yang kuat bagi pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat secara spontan. Sehubungan dengan hal tersebut, fasilitator desa dan penyuluh bekerjasama dengan staf teknis pemerintah dan swasta, penyedia pelayanan pengembangan usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait akan melakukan serangkaian kegiatan seperti sebagai berikut:

a) Lokakarya Pendahuluan (*Introductory Workshop*) tentang penilaian partisipatif terhadap topik tertentu, mencakup permasalahan dan peluang dalam sistem pengelolaan sumber daya alam, analisis gender dalam mata pencaharian dan analisis peluang pasar. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun pertama pelaksanaan program READ di setiap desa, selama satu sampai dua hari, serta di hadiri oleh aparat desa.

b) Fasitasi Penyusunan Proposal (*Rural Infrastructure Projects*) untuk kegiatan sarana pedesaan yang akan dibiayai oleh program READ. Kegiatan ini difasilitasi oleh fasilitator desa serta didukung oleh tenaga teknis/ahli untuk membantu masyarakat mengidentifikasi dan merancang kebutuhan sarana pedesaan yang diperlukan oleh masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi dan kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun ke dua pelaksanaan program READ di setiap desa. Proposal ini akan diverifikasi kelayakannya oleh tim di kabupaten untuk memperoleh dana pembangunan sarana desa (*infrastructure fund*).

c) Pelatihan/lokakarya tentang organisasi dan manajemen bagi kelompok, asosiasi dan individual, dengan materi antara lain mengenai: Pembentukan kelompok, motivasi, kepemimpinan, pengembangan organisasi dan manajemen, kesadaran gender, pembentukan dan pengelolaan kelompok simpan pinjam, proses partisipatif, pengembangan dan perencanaan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa

d) Studi banding bagi aparat desa ke desa lain dan lokakarya untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di pedesaan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun di setiap kabupaten, serta diikuti minimal lima orang peserta.

e) Penyusunan materi diseminasi informasi mengenai kegiatan pembangunan di pedesaan, terutama inisiatif dari dan dilaksankan oleh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kabupaten dimulai pada tahun kedua pelaksanaan program READ untuk menginformasikan berbagai inisiatif dan kegiatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

4.1.1.3.2 Peningkatan Kapasitas Lembaga di Tingkat Masyarakat dan Mengembangkan Kemitraan Dengan Sektor Komersial

Dalam kegiatan ini fasilitator desa akan melaksanakan strategi berikut:

a) Bekerja sama erat dengan staf program untuk memberikan akses kepada kelompok dan individu di desa pada pelayanan ekonomi yang lebih luas.
b) Bekerja sama dengan staf kecamatan dan perbankan kabupaten mengembangkan keterkaitan antara perbankan dan kelompok simpan pinjam.
c) Bersinergi dengan komponen pengembangan usaha pertanian budidaya dan non-budidaya untuk: (i) membawa perspektif masyarakat khususnya masyarakat miskin saat mengembangkan pilihan agribisnis dan usaha skala mikro serta perancangan pelayanan non-keuangan (ii) mengembangkan penelitian dan penyuluhan petani secara partisipatif, dan (iii) memperbaiki pengelolaan sumber daya alam.

4.1.1.3.3 Peningkatan Kelompok Miskin dan Marginal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Kegiatan yang akan dilakukan adalah:

a) Pelatihan/bimbingan bagi kelompok-kelompok yang akan dilaksanakan dua kali dalam setahun disetiap desa, dimulai pada tahun ke dua pelaksanaan program.
b) Pelatihan khusus yang diperlukan oleh masyarakat miskin, yang akan dilaksanakan dua kali dalam setahun disetiap desa, dimulai pada tahun ke dua pelaksanaan program.
c) Penyediaan tenaga ahli dibidang pelatihan yang akan memfasilitasi pelatihan, serta menyusun kurikulum dan pedoman pelatihan yang diperlukan untuk aparat pemerintah daerah, Termasuk aparat desa. Penyediaan tenaga ahli akan dibiayai oleh dana pinjaman (*loan*), termasuk biaya pembayaran materi pelatihan.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, fasilitator desa akan memfasilitasi kegiatan sebagai berikut:

a) Analisis partisipatif sistem mata pencaharian masyarakat miskin.
b) Mendukung pengebangan organisasi yang ada dan memfasilitasi organisasi yang baru yang beranggotakan masyarakat miskin, perempuan dan kelompok tersisih dan dimaksudkan untuk menciptakan pendapatan bagi mereka.

c) Meningkatkan kemampuan kaum miskin, perempuan dan kelompok yang kurang beruntung untuk dapat berpatisipasi dalam mengelola dan mendapatkan manfaat dari infrastruktur yang dibangun oleh program.

d) Menigkatkan kapasitas masyarakat miskin, perempuan dan kelompok yang kurang beruntung untuk dapat berpartisipasi dalam mengelola dan mendapatkan manfaat dari pembangunan pertanian dan usaha yang didukung oleh program.

4.1.2 Komponen B *Farm And Off-Farm Enterprise Development* (Pengembangan Usaha Pertanian Budidaya Dan Non-Budidaya)

Dalam komponen ini terdapat tiga strategi untuk mencapai pengembangan usaha pertanian dan pedesaan yang berkelanjutan yang meliputi:

1. Perbaikan produktivitas usaha pedesaan, mendukung dan memperkuat penyedia jasa penelitian dan penyuluhan baru yang terdesentralisasi untuk mendiseminasikan informasi dan melatih para petani untuk menerapkan teknik-teknik yang dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya serta menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Mendukung kelompok dana bergulir bagi petani melalui studi banding dan penyediaan dana bergulir
2. Integrasi komersial usaha-usaha pedesaan, meningkatkan kapasitas kelompok tani dalam bidang kewirausahaan, pengelolaan usaha dan pemasaran. Mengembangkan keterkaitan kedepan dan kebelakang

dalam rantai *supply* untuk menguatkan koneksitas dengan perekonomian di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, dan menyediakan peluang usaha yang menguntungkan bagi UKM dan usaha mikro.

3. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam, mendukung pelaksanaan teknik *low external input sustainable agriculture* (LEISA) dan *sloping agricultural land technology* (SALT) untuk memperbaiki praktek-praktek produksi pertanian yang berkelanjutan. Mendukung pemetaan desa untuk menyediakan informasi yang diperlukan bagi upaya perlindungan sumber daya alam melalui sistem pengelolaan yang bertanggung jawab yang menitik beratkan pada kelanjutan dan produktivitas usaha pedesaan berbasis sumber daya alam dalam jangka panjang.

4.1.2.1 Sub-Komponen B.1 Perbaikan Produktivitas Perdesaan

Tujuan dari sub-komponen ini adalah untuk mendukung dan memperkuat pelayanan penyuluhan dan penelitian yang terdesentralisasi dalam menyampaikan informasi dan memfasilitasi petani menerapkan berbagai teknologi untuk meningkatkan produksi, mengurangi biaya produksi serta meningkatkan kualitas produk, dan menyediakan dana untuk pengembangan usaha. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

4.1.2.1.1 Kegiatan Penyuluhan Pertanian (*Extension Outreach*)

a) Pengadaan kendaraan bermotor roda dua untuk para penyuluh yang sesuai dengan kebutuhan penyuluh (laki-laki dan perempuan). Jumlah pengadaaan sesuai dengan kebutuhan di lokasi program. Pengadaan kendaraan bermotor akan dilaksanakan oleh kabupaten dengan mengacu pada prosedur pengadaan barang yang telah ditetapkan dalam pedoman.

b) Pelatihan untuk penyuluhan di lokasi program megenai keterampilan mobilisasi masyarakat dan inisiatif pertanian, selama lima hari. Kegiatan ini akan dilaksanakan di kabupaten. Konsultan pengelolaan sumber daya alam (NRM *Specialist*) akan menyusun kurikulum dan pedoman pelatihan mengenai teknologi dan produksi perdesaan, serta memfasilitasi pelaksanaan pelatihannya.

c) Penyusunan pedoman penyuluhan. Kegiatan ini dilaksanakan dilahan petani untuk mengatasi permasalahan kunci. Kebutuhan dan peluang yang ada yang akan dilaksanakan secara partisipatif dengan kelompok masyarakat yang telah difasilitasi di komponen A, dan fasilitator desa. Jenis, bentuk dan jumlah pedoman penyuluhan sesuai dengan kebutuha masing-masing desa/kabupaten.

d) Pelaksanaan Sekolah Lapangan petani (SL). Kegiatan ini dilaksanakan dilahan petani untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi petani dalam usaha pertanian budidaya di suatu agroekosistem tertentu.

Kegiatan difasilitasi oleh penyuluh pertanian yang telah dilatih dalam pelaksanaan sekolah lapangan petani. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan usaha pertanian budidaya, serta dihadiri oleh dua puluh lima orang petani.

e) Kunjungan antar petani (*farmer to farmer visit*). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk tukar menukar pengalaman dan informasi diantara petani lokasi program READ maupun petani di lokasi luar program READ tentang keberhasilan penerapan suatu teknologi yang berkaitan dengan pengembangan usaha pertanian budidaya maupun non-budidaya. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tahun kedua pelaksanaan program. Setiap kunjungan diikuti oleh tiga puluh orang petani.

f) Pelaksanaan demonstrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada petani tentang teknologi baru untuk usaha pertanian budidaya dan non-budidaya. Kegiatan ini diusahakan untuk dilaksanakan dilahan petani supaya dapat langsung ditunjukan hasilnya kepada petani. Bila tidak memungkinkan, dapat dilakukan di lahan percontohan balai penyuluh pertanian. Kegiatan difasilitasi oleh penyuluh pertanian.

4.1.2.1.2 Pengembangan Usaha Pembenihan Komersial (*Commercial Seed Enterprise*)

Kegiatan ini mencakup:

a) Pelatihan untuk kelompok tani. Pelatihan ini dilaksanakan bagi para petani yang akan menjadi penakar benih komersial. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh tenaga konsultan ahli perbenihan yang akan direkrut oleh kabupaten dengan mengacu pada pedoman jasa konsultan.
b) Pengadaan jasa konsultan akan disediakan oleh program untuk memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan secara komersial, termasuk bantuan teknis dalam bidang pemasaran dan distribusi benih padi secara komersial. Konsultan akan direkrut setiap tahun sesuai dengan kebutuhan daerah.
c) Penyedian benih padi varietas terpilih untuk pengembangan benih (*starter pack*). Setiap kabupaten akan mendistribusikan sejumlah benih bagi petani yang telah dilatih untuk menjadi penangkar benih padi.

4.1.2.1.3 Penyedian Dana Untuk Pengembangan Usaha Bagi Petani (*Farm Improvement Fund/Farmer Enterprise Development Fund*)

Untuk pengunaan dana tersebut program akan memfasilitasi kegiatan sebagai berikut:

a) Pelatihan bagi kelompok petani yang memperoleh dana pengembangan usaha petani. Jumlah kelompok tani yang memperoleh pelatihan rata-

rata dua kelompok per desa. Pelatihan ini akan membekali petani dengan berbagai keterampilan dalam pengelolaan usahanya supaya lebih menguntungkan. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh penyuluh pertanian dan fasilitator desa.

b) Kunjungan antar petani. Disamping itu, para petani yang memperoleh dana pengembangan usaha akan diberi kesempatan untuk melakukan tukar menukar pengalaman dengan petani lainnya di desa lain yang berkaitan dengan pengembangan usahanya. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh penyuluh pertanian dan fasilitator desa.

c) Penyediaan dana untuk mengembangkan usaha bagi kelompok akan diatur dengan pedoman tersendiri. Jumlah petani yang akan memperoleh dana sekitar dua puluh lima orang per desa, dengan total dana per desa Rp. 22.500.000. (Draf Program READ 2007:58)

4.1.2.1.4 Intensifikasi Usaha Di Perkarangan (*Intensive Homestead Production*)

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produktivitas lahan perkarangan di sekitar rumah untuk mendukung ketersediaan pangan dan kecukupan gizi keluarga. Serta pendapatan keluarga. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh anggota keluarga (laki-laki, perempuan, termasuk anak-anak). Untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi usaha di perkarangan, program akan memfasilitasi:

a) Pelatihan kepada petani yang aka dikelompokan dalam kelompok belajar, satu kelompok belajar per desa.

b) Penyediaan benih sayuran dan bibit buah-buahan untuk kelompok petani yang telah dilatih. Diharapkan kelompok petani tersebut dapat menyebarkan hasil pelatihan dan pelaksanaan usahanya ke petani lain disekitarnya.

4.1.2.2 Sub-Komponen B.2 Integrasi Komersial Usaha-Usaha Perdesaan

Sub-komponen ini bertujuan untuk membangun kemitraan kegiatan ekonomi di tingkat desa dan kabupaten, provinsi dan pusat, serta menyediakan peluang usaha yang menguntungkan untuk pengembangan usaha mikro. Sub-komponen ini akan dilaksanakan di provinsi dan kabupaten.

4.1.2.2.1 Kegiatan Di Provinsi

a) Penyusunan daftar penyedia jasa yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro. Kegiatan ini dilaksanakan oleh konsultan yang akan direkrut oleh provinsi, termasuk perbanyakan dokumennya. Konsultan akan melakukan wawancara kepada para calon penyedia jasa yang potensial. Konsultan ini juga akan melakukan pertemuan dengan para calon penyedia jasa untuk menjelaskan program dan bagaimana caranya agar dapat berpatisipasi dalam program. Individu atau organisasi yang tertarik untuk menjadi penyedia jasa, akan diminta untuk mendaftarkan nama mereka.
b) Penyusunan strategi komersialisasi usaha pertanian, kegiatan ini mencakup:

1. Studi banding ke Sulawesi selatan untuk sepuluh orang peserta, tentang pengembangan usaha mikro di sektor pertanian. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi aparat pertanian di Sulawesi tengah dalam mengembangkan agribisnis di kabupaten lokasi program.
2. Penyediaan tenaga konsultan di bidang agri bisnis untuk menyusun strategi komersialisasi usaha pertanian.

4.1.2.2.2 Kegiatan Di Kabupaten

Mencakup pelaksanaan kegiatan percontohan tentang strategi komersialisasi usaha di perdesaan, yang mencakup:

1. Bantuan teknis dan manajemen pada tahap awal pembentukan usaha.
2. Pelatihan teknologi tepat guna.
3. Penyediaan informasi pasar.
4. Penyediaan pembiayaan bagi pasar *intermediary* dan usaha kecil perdesaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun ke dua pelaksanaan program di setiap kabupaten lokasi program oleh konsultan dengan bekerja sama dengan penyuluh pertanian dan fasilitator desa.

4.1.2.3 Sub-Komponen B.3 Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sub-komponen ini bertujuan untuk memperbaiki kesinambungan praktek penerapan teknologi pertanian dan konservasi sumber daya alam. Kegiatan

dilaksanakan melalui penyediaan peluang untuk uji coba dan demonstrasi ide-ide pengelolaan sumber daya alam secara lebih baik. Program akan mendukung pelaksanaan sejumlah proyek uji coba program-program pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan ini akan dilaksanakan di provinsi dan kabupaten.

4.1.2.3.1 Kegiatan Di Provinsi

a) Desentralisasi pengembangan kebijakan di bidang pertanahan dan pemetaan lahan di desa, yang akan dilaksanakan dengan: (i) peyediaan konsultan, (ii) pembuatan peta dengan menggunakan *Geografic Information System* (GIS) dan (iii) lokakarya. Petani miskin sering kali termaginalisasi dalam hal akses pada lahan dan hak atas kepemilikan tanah. Hal ini khususnya menjadi sangat penting di wilayah penyangga hutan yang dilindungi. Program akan menyediakan dukungan untuk replikasi pendekatan perecanaan dan pemetaan masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan jasa pelayanan dengan keahlian khusus dalam bidang pemetaan lahan masyarakat desa bekerjasama dengan fasilitator desa, PPL pertanian dan PPL kehutanan, dan staf manajemen lahan.

b) Pelaksanaan percontohan produksi yang ramah lingkungan (*eco production pilot*), akan dilaksanakan dengan: (i) penyedian konsultan untuk melaksanakan pelatihan akreditasi produk ramah lingkungan, (ii) lokakarya tentang pelaksanaan percontohan produk ramah lingkungan, dan (iii) lokakarya tentang studi lingkungan.

4.1.2.3.2 Kegiatan Di Kabupaten

Kegiatan di kabupaten mencakup pelaksanaan uji coba yang berkaitan dengan penerapan teknologi penerapan di lahan miring (*Sloping Agricultural Land Technologies*/SALT). Teknologi ini mengintegrasikan bermacam-macam konservasi tanah dengan usaha produksi pangan. Beberapa teknis dalam teknologi ini misalnya, penanaman berbagai jenis tanaman nitrogen sebagai pakan ternak atau untuk pupuk, dan sebagainya. Inisiatif uji coba kegiatan ini melibatkan kombinasi SALT dan komponen intensifikasi produksi pertanian rumah tangga dalam bentuk program organik atau LEISA. Kegiatan ini akan mendorong kearah pengembangan potensi, akreditasi dan audit pemasaran produk *agri-eco* yang "bersih dan hijau", sebagai hasil langsung pelaksanaan kegiatan pertanian yang berkelanjutan. Program akan menyediakan pembiayaan untuk bantuan teknis, peralatan, serta material yang diperlukan untuk pelaksanaan demonstrasi, dan uji coba teknik-teknik dan pendekatan ini.

4.1.3 Komponen C *Rural Infastructure* (Infastuktur Perdesaan)

4.1.3.1 Jenis Infrastruktur Yang Akan Dibiayai Program READ

- **Jalan Desa,** Program akan membiayai pembangunan (i) jalan akses yang menghubungkan jalan desa dengan jalan yang hirarkinya lebih tinggi atau jalan yang menghubungkan kota terdekat, (ii) jalan usaha tani yang menghubungkan wilayah-wilayah pertanian di desa. Dana IFAD akan digunakan untuk membiayai 90% biayai individual konstruksi jalan akses dan 80% individual jalan usaha tani, diharapkan pemerintah

kabupaten dan masyarakat penerima manfaat masing-masing berkontribusi, sebesar 10%. Perkiraan biaya konstruksi: (i) jalan akses Rp 63 juta-Rp 117 juta per km, (ii) jalan usaha tani Rp 27 juta-Rp 45 juta per km.

- **Fasilitas Air Bersih,** Program akan membiayai pembangunan fasilitas air bersih dengan sumber dari sungai, mata air, danau atau air tanah. Program akan menyediakan dana hingga 80% dari total biaya kegiatan per desa/system, diharapkan pemerintah kabupaten dan masyarakat penerima manfaat masing-masing berkontribusi 10%. Masyarakat penerima manfaat bertanggung jawab untuk melakukan operasi dan pemeliharaan fasilitas yang dibangun. Biaya konstruksi diperkirakan Rp 630.000-Rp 720.000 per rumah tangga.
- **Irigasi Desa,** Program akan membiayai pembangunan irigasi desa yang memungkinkan para petani untuk panen lebih dari satu kali dalam setahun. Program akan menyediakan dana hingga 80% dari total biaya proyek per desa/sistem. Diharapkan pemerintah kabupaten dan para petani penerima manfaat masing-masing berkontribusi 10%. Rata-rata perkiraan biaya konstruksi mencapai Rp 6.300.000- Rp 10 juta per Ha.
- **Infrastruktur Lainnya,** Program akan membiayai jenis-jenis infrastruktur lain yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat miskin. Sebagai contoh, perluasan sederhana jaringan kelistrikan,

pembangunan dermaga kecil bagi desa-desa terpencil untuk transportasi atau usaha perikanan dan pembangunan pasar.

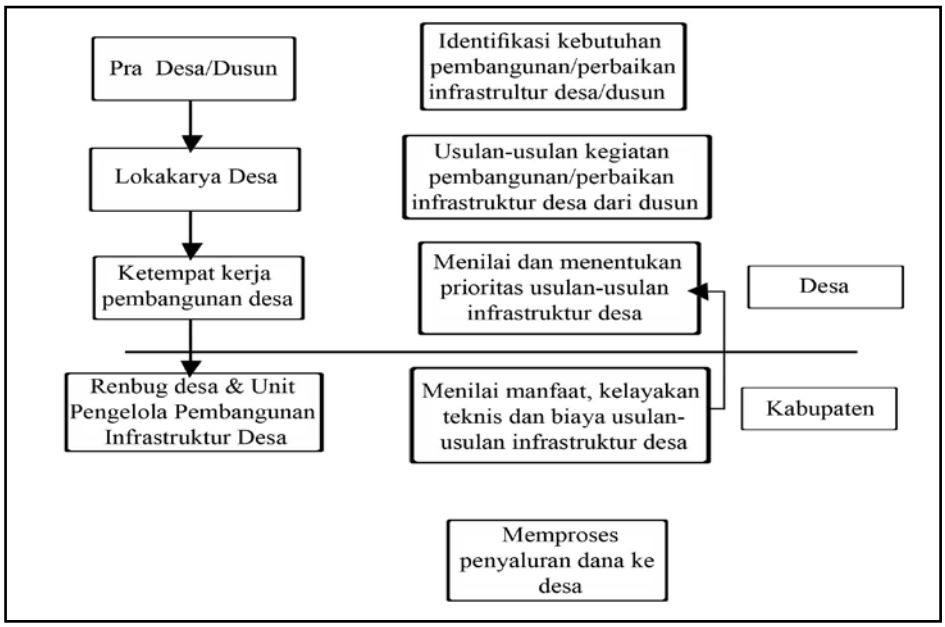
- **Bantuan Teknis,** Bantuan teknis untuk penelitian, perancangan, supervise konstruksi dan operasional dan pemeliharaan yang disediakan oleh dinas teknis kabupaten. Biaya Program READ memasukan 4% dari total biaya investasi infrastruktur untuk biaya-biaya rutin dinas/instansi tersebut. Fasilitator desa akan bekerjasama dengan masyarakat untuk menyiapkan usulan kegiatan, serta membantu mereka berinteraksi dengan staf professional dan teknis dinas/instansi teknis dalam seleksi dan perancangan kegiatan dan memungkinkan mereka melakukan monitoring pekerjaan konstruksi kegiatan untuk menjamin bahwa rencana dan rancangan yang telah disepakati dilaksanakan.
- **Operasi Dan Pemeliharaan,** Masyarakat akan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas air bersih, irigasi dan pemeliharaan jalan usaha tani. Pemerintah kabupaten akan melakukan pemeliharaan jalan akses. Program akan membantu masyarakat untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam melakukan operasi dan pemeliharaan fasilitas yang dibangun program. (Draf program READ, 2007:71-72)

Tabel 4.1
Persyaratan Teknis Infrastruktur Desa

Infrastruktur	Kriteria
Jalan Perdesaan	• Jalan akses yang menghubungkan desa dengan jaringan jalan hirarki yang lebih tinggi menuju pusat kota. • Maksimum panjang jalan adalah 10 km untuk jalan desa, dan 5 km untuk jalan produksi usaha tani. • Maksimum biaya per km setara dengan USD 13.000, termasuk gorong-gorong dan jembatan untuk jalan desa, USD 5.000 untuk jalan produksi usaha tani, kecuali dengan persetujuan sebelumnya dari IFAD. • Maksimum jumlah pelanggan 500 rumah tangga per paket. • Hanya konstruksi baru yang dibiayai
Air Bersih Irigasi Perdesaan Lain-Lain	• Sumber air dari sungai, mata air, danau, fasilitas yang dibangun meliputi intake system gravitasi, perpipaan ke tempat penampungan desa, reticulation pipes di wilayah dalam desa dan stand pipes. • Maksimum biaya per pelanggan rumah tangga setara dengan USD 100. • Maksimum cakupan irigasi per paket 150 Ha. • Maksimum biaya setara dengan USD 1.200 per Ha • Fasilitas terdiri dari *intake system* gravitasi, saluran utama ke kawasan irigasi, saluran distribusi dan saluran air kolektor, kecuali ada persetujuan sebelumnya dari IFAD • Kriteria disepakati antara pemerintah kabupaten lokasi program READ dan IFAD, sesuai dengan permohonan dari masyarakat.

(Sumber: Pelaksanaan Program READ, 2007 : 72-73)

Dibawah ini juga menjelaskan diagram mengenai penyampaian usulan pembanunan infrastruktur desa dalam pelaksanaan program READ.langkah-langkah pelaksanaan di daerah ini difokuskan untuk identifikasi kebutuhan pembangunan pedesaan, menilai dan menyusun strategi dalam proses pengembangan, dan menentukan prioritas usulan-usulan pengembangan infrastruktur dalam proses penyaluran dana dari READ.



(Sumber: Pelaksanaan Program READ, 2007: 74)

Gambar 4.1
Langkah Penyampaian Usulan Pembangunan Infrastruktur Desa

Keterangan:

↓ **:** Garis Penghubung

– **:** Pembatas Antara Desa Dan Kabupaten

4.1.4 Komponen D *Program Management And Policy Analysis* (Pengelolaan Program Dan Analisis Kebijakan)

4.1.4.1 Sub-Komponen D.1 Pengelolaan Program Mencakup:

a. Manajemen dan koordinasi di tingkat pusat. Monitoring dan evaluasi (tingkat pusat, provinsi dan kabupaten) termasuk pelaksanaan *baseline survey.*

b. Pelatihan manajemen bagi pengelola program di provinsi dan kabupaten. Pengembangan media untuk diseminasi informasi keberhasilan kegiatan program.
c. Penyediaan tenaga konsultan untuk mendukung pelaksanaan program di pusat provinsi dan kabupaten.
d. Manajemen dan supervisi pelaksanaan program ditingkat kabupaten.

4.1.4.2 Sub-Komponen D.2 Analisis Kebijakan

Sub-komponen ini akan dilaksanakan oleh biro kerjasama luar negeri departemen pertanian, dengan kegiatan utama:

a. Pelaksanaan studi tentang kebijakan dibidang kemiskinan yang berkaitan dengan pertanian.
b. Diseminasi hasil analisis kebijakan untuk perumusan kebijakan dimasa datang.
c. Dokumentasi pengalaman keberhasilan dan inovasi.
d. Diseminasi informasi melalui website tentang berbagai kebijakan dibidang pertanian dan kemiskinan.
e. Menyediakan masukan bagi pembuat keputusan di departemen pertanian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) serta departemen terkait lainnya yang terkait dengan kebijakan pembangunan pertanian dan kemiskinan.

4.2 Analisis Perencanaan Program READ Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pedesaan Di Sulawesi Tengah

Untuk menganalisa perencanaan program READ yang direncanakan pada tahun 2009-2014 dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dapat di lihat dari empat komponen pengembangan tingkat pendapatan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah.

4.2.1 Komponen A *Community Empowerment* (Pemberdayaan Masyarakat)

Dalam komponen A, difokuskan pada proses pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dilihat dari perspektif bahwa manusia merupakan aset yang paling vital untuk pengembangan pendapatan masyarakat. Dalam proses pengembangan SDM melalui program READ difokuskan pada pengadaan tenaga ahli dan jasa konsultan, pelaksanaan lokakarya, seminar, penyuluhan kepada aparat pemerintah sebagai fasilitator desa dan kepada masyarakat mengenai program READ dan cara pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pada peningkatan kelompok miskin dan marginal dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.

4.2.1.1 Penyediaan Tenaga Ahli dan Jasa Konsultan

Dalam proses penyedian tenaga ahli dan jasa konsultan yang dipilih oleh READ. Tenaga ahli dan jasa konsultan ini di butuhkan dalam proses pengembangan SDM sebagai fasilitator desa, proses pengenalan program READ

kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pada 5 kabupaten di Sulawesi Tengah untuk proses peningkatan pendapatan masyarakat.

Di setiap desa ada seorang fasilitator desa (total ada 150 fasilitator desa), pemilihan fasilitator desa disesuaikan dengan jumlah desa sasaran yang melaksanakan program READ. Jumlah fasilitator desa antara laki-laki dan perempuan diusahakan seimbang sesuai dengan kebutuhan di desa lokasi program. Pengadaan fasilitator desa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jumlah desa yang menjadi lokasi program.

Penyediaan tenaga ahli dibidang pelatihan yang akan memfasilitasi pelatihan, serta menyusun kurikulum dan pedoman pelatihan yang diperlukan untuk aparat pemerintah daerah, termasuk aparat desa. Penyediaan tenaga ahli akan dibiayai oleh dana pinjaman, termasuk biaya perbaikan materi pelatihan.

Jasa konsultan untuk melakukan wawancara kepada para calon penyedia jasa yang potensial. Konsultan juga bertugas akan melakukan pertemuan dengan para calon penyedia jasa untuk menjelaskan program dan bagaimana caranya agar dapat berpatisipasi dalam program.

4.2.1.2 Pelaksanaan Lokakarya Atau Seminar Kepada Aparat Pemerintah Sebagai Fasilitator Desa

a. Lokakarya Tahunan Perencanaan Desa

Dalam lokakarya tersebut para staf program READ khususnya para aparat desa memberikan penyuluhan tentang program READ kepada masyarakat melalui seminar-seminar, dimana nantinya masyarakat pedesaan dapat memperoleh tata

cara penerapan program READ tersebut. Lokakarya ini juga bertujuan mengembangkan sektor pertanian dan pemeliharaan prasarana yang telah di biayai dan di perbaiki oleh program READ, seperti pemeliharaan infrastruktur, dimana masyarakat di berikan tanggung jawab dalam pemeliharaan infrastruktur tersebut, sehingga nantinya hasil-hasil pertahun dari pelaksanaan program READ dapat dijadikan bahan pengembangan untuk tahun-tahun berikutnya, yang disampaikan oleh staf program READ kepada masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah.

b. Peningkatan Pelayanan Aparat Pemerintah (*Public Sector Up-Reach*)

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada seluruh staf program baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten sehingga para staf program dapat menyampaikan penyuluhan mengenai program READ dengan maksimal kepada masyarakat. Selain itu dalam kegiatan ini, para staf program di masing-masing kabupaten saling tukar- menukar informasi mengenai hasil yang telah di capai dalam pelaksanaan program READ di lapangan, dari proses ini para staf program dapat mengetahui hal-hal apa saja yang di butuhkan dalam proses penerapan program READ kepada masyarakat.

4.2.1.3 Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program READ dan cara pengelolaan sumber daya alam.

Dalam proses penyuluhan program READ kepada masyarakat, para staf program memberikan pelatihan keterampilan-keterampilan kepada para petani tentang tata cara pengembangan sektor pertanian, para petani diajarkan bagaimana proses mengolah lahan pertanian dan penanaman benih-benih pertanian sehingga

nantinya para petani dapat memperoleh hasil yang maksimal dari pengelolaan lahan pertanian mereka. Selain itu para staf program juga memberikan penyuluhan kepada para petani mengenai pengelolaan hasil pertanian tersebut, agar dapat terpelihara dengan baik dan menjadi asset pendapatan bagi para petani.

4.2.1.4 Peningkatan Kelompok Miskin dan Marginal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Maksud dari diadakannya kegiatan ini ialah, para tenaga ahli program READ menberikan penyuluhan kepada masyarakat miskin di pedesaan, khususnya yang tinggal di daerah marginal atau pinggiran, para staf program memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat miskin tersebut berupa teknik-teknik pegelolaan sektor pertanian yang nantinya dapat mereka gunakan sebagai asset perekonomian dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4.2.2 Komponen B *Farm And Off-Farm Enterprise Development* (Pengembangan Usaha Pertanian Budidaya Dan Non-Budidaya)

Dalam komponen B, difokuskan pada proses pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dilihat dari perspektif bahwa alam merupakan aset yang paling vital untuk pengembangan pendapatan masyarakat. Dalam proses pengembangan SDA melalui program READ difokuskan pada integrasi komersil bagi Unit Koperasi Masyarakat (UKM) dan usaha mikro, penyediaan benih sayuran, bibit buah-buahan, dan padi, serta penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil pedesaan.

4.2.2.1 Integrasi Komersil Bagi Unit Koperasi Masyarakat (UKM) dan Usaha Mikro

Dalam kegiatan ini masyarakat dapat meminjam modal untuk mengembangkan usaha di sektor pertanian melalui Unit Koperasi Masyarakat (UKM). Dengan adanya UKM, masyarakat dapat membuka peluang mata pencaharian guna menambah penghasilan mereka.

4.2.2.2 Penyediaan Benih Sayuran, Bibit Buah-buahan, dan Padi, serta Penyediaan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Pedesaan

Dalam kegiatan ini para staf program READ mengirimkan para tenaga-tenaga ahli di bidang perbenihan, para tenaga ahli perbenihan tersebut kemudian memberikan penyuluhan kepada para petani mengenai tata cara menanam benih agar hasil yang dicapai dapat maksimal, sehingga dari hasil penyediaan benih sayuran, bibit buah-buahan, dan padi tersebut dapat menghasilkan pendapatan bagi para petani, selain itu para staf program juga berperan dalam menyediakan biaya untuk masyarakat pedesaan yang memiliki usaha kecil pedesaan.

4.2.2.3 Penyediaan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Pedesaan

Untuk pengunaan dana tersebut program memfasilitasi kegiatan berupa, Pelatihan bagi kelompok petani yang memperoleh dana pengembangan usaha petani. Jumlah kelompok tani yang memperoleh pelatihan rata-rata dua kelompok per desa. Pelatihan ini membekali petani dengan berbagai keterampilan dalam pengelolaan usahanya supaya lebih menguntungkan. Kegiatan ini difasilitasi oleh

penyuluh pertanian dan fasilitator desa. Disamping itu, para petani yang memperoleh dana pengembangan usaha akan diberi kesempatan untuk melakukan tukar menukar pengalaman dengan petani lainnya di desa lain yang berkaitan dengan pengembangan usahanya. Kegiatan ini difasilitasi oleh penyuluh pertanian dan fasilitator desa. Penyediaan dana untuk mengembangkan usaha bagi kelompok diatur dengan pedoman tersendiri. Jumlah petani yang memperoleh dana sekitar dua puluh lima orang per desa.

4.2.3 Komponen C *Rural Infastructure* (Infastuktur Perdesaan)

Dalam komponen C, difokuskan pada proses pengembangan infrastruktur pedesaan dilihat dari perspektif bahwa akses jalan masuk merupakan aset yang paling vital untuk pengembangan pendapatan masyarakat. Dalam proses pengembangan infrastruktur pedesaan melalui program READ difokuskan pada Perbaikan sumber daya alam dalam bentuk pelaksanaan teknik *low external input suistanable agriculture* (LEISA) dan *sloping agricultural teknology* (SALT), Membiayai jalan desa, fasilitas air bersih, irigasi desa, infrastruktur lain, bantuan teknis, operasi dan pemeliharaan.

4.2.3.1 Perbaikan Sumber Daya Alam (SDA) dalam Bentuk Pelaksanaan Teknik *Low External Input Suistanable Agriculture* (LEISA) dan *Sloping Agricultural Teknology* (SALT)

Kegitan ini mencakup pelaksanaan uji coba yang berkaitan dengan penerapan teknologi penerapan di lahan miring (*Sloping Agricultural Land*

Technologies/SALT). Teknologi ini mengintegrasikan bermacam-macam konservasi tanah dengan usaha produksi pangan. Beberapa teknis dalam teknologi ini misalnya, penanaman berbagai jenis tanaman nitrogen sebagai pakan ternak atau untuk pupuk, dan sebagainya. Inisiatif uji coba kegiatan ini melibatkan kombinasi SALT dan komponen intensifikasi produksi pertanian rumah tangga dalam bentuk program organic atau LEISA. Kegiatan ini akan mendorong kearah pengembangan potensi, akreditasi dan audit pemasaran produk *agri-eco* yang "bersih dan hijau", sebagai hasil langsung pelaksanaan kegiatan pertanian yang berkelanjutan. Program akan menyediakan pembiayaan untuk bantuan teknis, peralatan, serta material yang diperlukan untuk pelaksanaan demonstrasi, dan uji coba teknik-teknik dan pendekatan ini.

4.2.3.2 Membiayai Jalan Desa, Fasilitas Air Bersih, Irigasi Desa, Infrastruktur Lain, Bantuan Teknis, Operasi dan Pemeliharaan.

Dalam kegiatan ini jenis infrastruktur yang dibiayai oleh program READ ialah, Jalan Desa, Program membiayai pembangunan (i) jalan akses yang menghubungkan jalan desa dengan jalan yang hirarkinya lebih tinggi atau jalan yang menghubungkan kota terdekat, (ii) jalan usaha tani yang menghubungkan wilayah-wilayah pertanian di desa. Dana IFAD akan digunakan untuk membiayai 90% biayai individual konstruksi jalan akses dan 80% individual jalan usaha tani, diharapkan pemerintah kabupaten dan masyarakat penerima manfaat masing-masing berkontribusi, sebesar 10%. Fasilitas Air Bersih, Program membiayai pembangunan fasilitas air bersih dengan sumber dari sungai, mata air, danau atau

air tanah. Program menyediakan dana hingga 80% dari total biaya kegiatan per desa/system, diharapkan pemerintah kabupaten dan masyarakat penerima manfaat masing-masing berkontribusi 10%. Masyarakat penerima manfaat bertanggung jawab untuk mmelakukan operasi dan pemeliharaan fasilitas yang dibangun. Irigasi Desa, Program membiayai pembangunan irigasi desa yang memungkinkan para petani untuk panen lebih dari satu kali dalam setahun. Program menyediakan dana hingga 80% dari total biaya proyek per desa/sistem. Pemerintah kabupaten dan para petani penerima manfaat masing-masing berkontribusi 10%. Rata-rata Infrastruktur Lainnya, Program membiayai jenis-jenis infrastruktur lain yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat miskin. Sebagai contoh, perluasan sederhana jaringan kelistrikan, pembangunan dermaga kecil bagi desa-desa terpencil untuk transportasi atau usaha perikanan dan pembangunan pasar. Bantuan Teknis, Bantuan teknis untuk penelitian, perancangan, supervise konstruksi dan operasional dan pemeliharaan yang disediakan oleh dinas teknis kabupaten. Biaya Program READ memasukan 4% dari total biaya investasi infrastruktur untuk biaya-biaya rutin dinas/instansi tersebut. Fasilitator desa akan bekerjasama dengan masyarakat untuk menyiapkan usulan kegiatan, serta membantu mereka berinteraksi dengan staf professional dan teknis dinas/instansi teknis dalam seleksi dan perancangan kegiatan dan memungkinkan mereka melakukan monitoring pekerjaan konstruksi kegiatan untuk menjamin bahwa rencana dan rancangan yang telah disepakati dilaksanakan. Operasi dan Pemeliharaan, Masyarakat bertanggung jawab untuk melaksanakan pengoperasian

dan pemeliharaan fasilitas air bersih, irigasi dan pemeliharaan jalan usaha tani. Pemerintah kabupaten melakukan pemeliharaan jalan akses. Program membantu masyarakat untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam melakukan operasi dan pemeliharaan fasilitas yang dibangun program.

4.2.4 Komponen D *Program Management And Policy Analysis* (Pengelolaan Program dan Analisis Kebijakan)

Dalam komponen D, difokuskan pada proses pengembangan sistem pemerintahan dan birokrasi pedesaan dilihat dari perspektif bahwa sistem pemerintahan dan birokrasi pedesaan yang baik merupakan aset yang paling vital untuk pengembangan pendapatan masyarakat. Dalam proses pengembangan sistem pemerintahan dan birokrasi pedesaan melalui program READ difokuskan pada pengelolaan manajemen dan koordinasi di tingkat pusat. pelaksanaan studi mengenai kebijakan pertanian, penyampaian informasi melalui website menyediakan masukan bagi pembuat keputusan di departemen pertanian terkait dengan kebijakan pembangunan pertanian dan kemiskinan.

4.2.4.1 Pengelolaan Manajemen dan Koordinasi di Tingkat Pusat

Dengan diadakannya kegiatan ini, para staf program dapat melakukan manajemen dan koordinasi di tingkat pusat, sehingga penyuluhan program READ kepada masyarakat pedesaan dapat tersusun secara sistematis, selain itu hasil dari penerapan program READ juga dapat langsung di laporkan kepada staf program di tingkat pusat, yang nantinya akan di jadikan pedoman dalam membuat kebijakan-kebijakan di sektor pertanian.

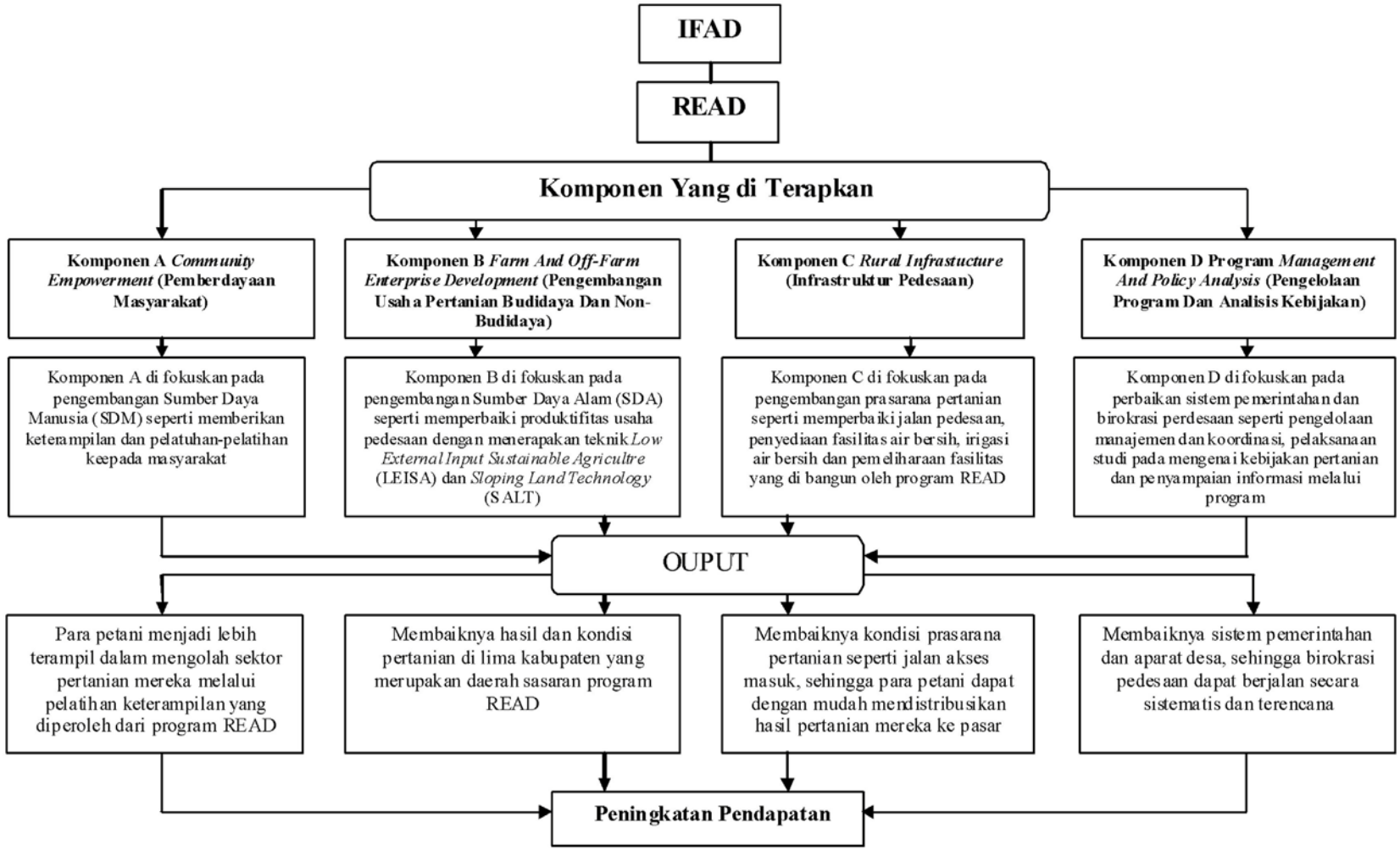
4.2.4.2 Pelaksanaan Studi Mengenai Kebijakan Pertanian

Dalam kegiatan ini seluruh staf program READ baik di tingkat provinsi dan kabupaten masing-masing mendapatkan pembelajaran mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu diterapkan kepada masyarakat yeng berhubungan dengan sektor pertanian, yang nantinya kebijakan yang di terapakan tersebut sangat bermanfaat dan tepat sasaran dalam memperbaiki sektor.

4.2.4.3 Penyampaian Informasi Melalui Website Bagi Pembuat Keputusan di Departemen Pertanian Terkait Dengan Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Kemiskinan

Dalam kegiatan ini para staf program READ setelah menerapkan peogram, mereka harus segera membuat laporan mengenai hasil dari penerapan program READ tersebut yang telah di implementasikan oleh masyarakat pedesaan, laporan mengenai hasil penerapan program READ tersebut akan di jadikan masukan oleh pembuat keputusa di Departemen Pertanian dalam hal ini badan yang bertanggung jawab ialah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP), badan ini kemudian menyampaikan informasi mengenai hasil penerapan program READ melalui website, hasil penerapan program READ tersebut juga nantinya akan menjadi landasan dalam membuat kebijakan pembagunan pertanian dan kemiskinan. Penyampaian informasi melalui website juga di maksudkan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat mengenai dampak dari penerapan program READ.

Skema 4.1
Perencanaan Program READ Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pedesaan Di Sulawesi Tengah



Sumber : Diolah oleh penulis

Skema di atas menjelaskan bahwa output yang diharapkan dapat dikembangkan oleh IFAD melalui program READ yang merupakan sebuah konsep dan inovasi yang di rancang dalam tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan khususnya para petani di Sulawesi Tengah. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di sulawesi tengah, READ merencanakan menerapkan empat komponen program yang terdiri dari, Komponen A *Community Empowerment* (Pemberdayaan Masyarakat) komponen ini bertujuan, memberikan keterampilan ditingkat pemerintah pusat dan masyarakat pedesaan agar mereka memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bentuk pemberian keterampilan ini difokuskan pada pelaksanaan seminar, pelatihan dan penyuluhan oleh para fasilitator yang diberikan dengan biaya dari IFAD.

Komponen B *Farm And Off-Farm Enterprise Development* (Pengembangan Usaha Pertanian Budidaya Dan Non-Budidaya), komponen ini bertujuan, menyediakan akses teknologi dan keterampilan manajemen yang bergerak sebagai pemasok barang dan jasa bagi petani miskin. Penerapan teknologi SALT dan LEISA, dan penyediaan bibit tanaman bagi masyarakat.

Komponen C *Rural Infrastucture* (Infrastruktur Pedesaan), komponen ini bertujuan, memperbaiki infrastruktur akses jalan pedesaan, irigasi air, infastruktur lainnya seperti jaringan pelistrikan, pembangunan dermaga kecil bagi desa-desa terpencil, agar para petani dapat dengan mudah mendistribusikan hasil pertanian

mereka ke pasar sehinga para petani mendapatkan upah dari hasil pertanian mereka.

Komponen D Program *Management And Policy Analysis* (Pengelolaan Program Dan Analisis Kebijakan), komponen ini bertujuan, mengkoordinir program READ dari tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten di Sulawesi Tengah sehingga program ini nantinya dapat berjalan dengan sistematis, terencana, dan tepat sasaran dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah.

4.3 Peranan IFAD Melalui Program READ Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Tengah

Kawasan pedesaan di Sulawesi Tengah yang terletak di dataran tinggi akibat kostur lahannya yang berbukit-bukit, tidak adanya akses dan pelayanan terhadap petani, dan adanya perbaikan mata pencaharian dan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan, merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi *International Fund For Agricultural Development* (IFAD) dalam merancang sebuah program *Rural Empowerment and Agricultural Development* (READ). Pada tanggal 22 November 2006 dibuatlah *Memoradum of Understanding* (MoU) mengenai program READ yang akan diterapkan di 5 kabupaten di Sulawesi Tengah yaitu kabupaten Parigi Moutong, Poso, Toli-Toli, Banggai, dan Buol. Bertempat di sekretariat *International Fund For Agricultural Development* (IFAD), Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, Susanto Sutoyo, mewakili pemerintah Indoneia dan Presiden IFAD, Lenart Bage, telah

menandatanggani MoU sekaligus perjanjian pinjaman untuk program READ. Setelah proses penandatanganan pelaksanaan program READ, maka dibuatlah peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/OT.160/6/2007 Tentang Oganisasi dan Tata Cara Program Pemberdayaan Pedesaan dan Pembangunan Pertanian di Sulawesi Tengah (*Rural Empowerment and Agricultural Development*/READ *Programme In Central Sulawesi*).

Hasil yang di harapkan dari program READ, ialah berfungsinya kelembagaan tingkat desa, kegiatan kelompok secara efektif, diterapkannya sistem produksi dan pemasaran, sistem pengelolan Sumber Daya Alam (SDA) yang lebih baik, dan pembentukan usaha non pertanian baru atau pengembangan usaha yang telah ada oleh kelompok petani, sasaran perbaikan prasarana yang ada di desa-desa sasaran melalui partisipasi masyarakat dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaanya, serta meningkatnya kemampuan Departemen Pertanian dalam melakukan analisis dan merumuskan kebijakan petani miskin di pedesaan.

Pendekatan Program READ difokuskan pada elemen utama sebagai berikut, mendukung inisiatif untuk meningkatkan kemampuan petani miskin dalam mengelola pembangunan sosial-ekonominya sehingga menjadi lembaga masyarakat yang lebih transparan, akuntabel, adil dan kompeten, mendukung sistem desentralisasi pemerintahan yang dimaksudkan untuk mendekatkan sumberdaya pemerintah pada masyarakat, meningkatkan ketanggapan pada kebutuhan lokal dan akuntabilitas pemerintah pada petani miskin, membantu mengatasi kendala yang dialami oleh para petani miskin untuk mencapai tingkat

pendapatan yang lebih tinggi dan perbaikan ketahanan pangan dari usaha pertanian dan non-pertanian memperbaiki kondisi prasarana pedesaan yang kurang memadai yang dapat menghambat kegiatan produksi dan pemasaran yang dilakukan para petani miskin dan pengusaha lainnya, melalui kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Investasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat yang dituangkan dalam rencana pembangunan desa, dan mendukung Departemen Pertanian sebagai lembaga fasilitas dan koordinasi dalam program pengurangan kemiskinan, bukan hanya sebagai lembaga pelaksana / *implementing* agency dalam dukungan kebijakan desentralisasi pemerintahan. Komponen Program READ meliputi : Komponen A Pemberdayaan Masyarakat, komponen ini meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan sesuai dengan sumber daya dan peluang yang dimilikinya. Komponen B Pengembangan Usaha Pertanian Budidaya Dan Non-Budidaya, komponen ini dimaksudkan untuk menyediakan akses pada teknologi dan keterampilan manajemen yang bergerak sebagai pemasok barang dan jasa bagi petani miskin. Komponen C Prasarana Pedesaan, komponen ini akan membiayai berbagai prasarana pedesaan yang di butuhkan para masyarakat pedesaan untuk akses pertanian mereka. Komponen D Pengelolaan Proyek Dan Analisis Kebijakan, komponen ini mendukung pengelolaan dan koordinasi program READ melalui struktur pemerintahan yang ada.

Program READ awalnya mulai direalisasikan pada kurun waktu 2007-2011, namun di karenakan ada masalah finansial dalam proses penyaluran dana, maka program ini mengalami pengunduran waktu implementasi dalam penerapannya yang awalnya direalisasikan pada tahun 2006-2011 menjadi tahun 2009-2014. (wawancara dengan Ir. Sri Damayanti, Med.,Mphil. READ *Programme Manager*).

Dalam kurun waktu 2007-2008 proses pelaksanaan yang telah dilakukan hanya sebatas perencanaan yang berbentuk Peraturan Menteri Pertanian dan kesepakatan perjanjian pinjaman yang tertulis dalam MoU mengenai langkah-langkah program READ yang nantinya dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah. Dengan demikian IFAD telah berperan dalam membantu meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah melalui program READ dengan menerapkan empat komponen yang terdiri dari pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha pertanian budidaya dan non-budidaya, prasarana pedesaan, dan program pengelolaan dan analisis kebijakan.